

BAB I

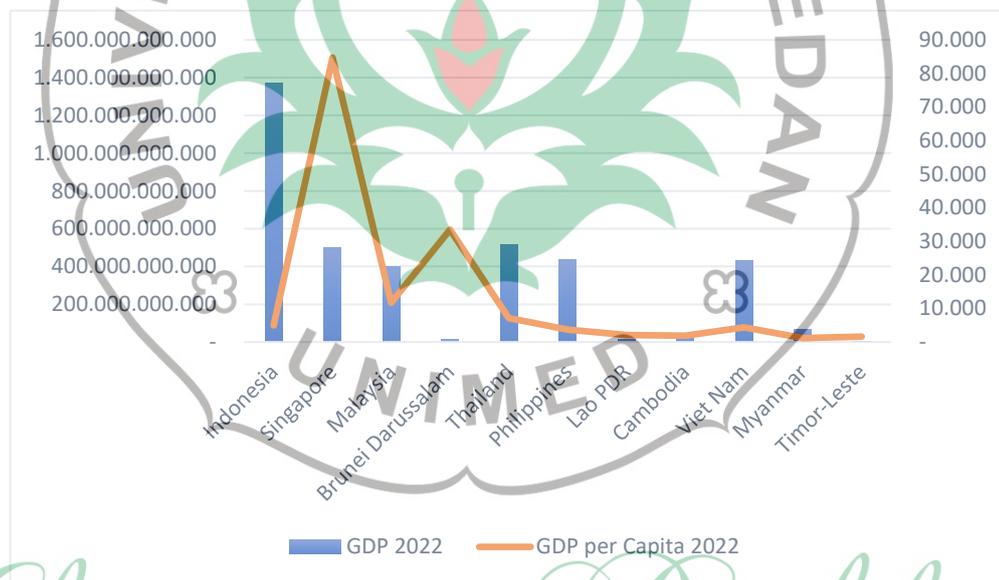
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masifnya efek globalisasi 20 tahun terakhir mengakibatkan perekonomian diseluruh dunia mengalami peningkatan signifikan. Peningkatan teknologi terutama untuk pengolahan data, informasi maupun komunikasi seakan membuat dunia menyusut, kehilangan batas negara, dan menjadi tempat yang menjadi tanpa batas (Hermawanto dan Anggrani, 2020). Karena seakan menjadi tempat tanpa batas (*borderless place*), setiap negara dapat mempercepat atau memperluas akses perekonomian negaranya secara global melalui teknologi sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami kondisi yang sangat berbeda dari 20 tahun terakhir (Wong, dkk., 2021). Globalisasi membuka kesempatan bagi negara untuk maju namun tidak semua negara mampu untuk mencapai tahap itu, banyak negara yang belum dapat merasakan perkembangan teknologi terutama negara berpendapatan menengah kebawah (*lower-middle income*), salah satu alasan mengapa masih banyak negara belum dapat memaksimalkan kemajuan teknologi adalah kebijakan ekonomi yang digunakan dalam negara tersebut terutama negara berpendapatan menengah kebawah. Kebijakan perekonomian yang digunakan kurang efektif atau implementasi yang kurang baik, yang berakibat pada kemajuan negaranya sendiri, hingga pada akhirnya akan menimbulkan kontradiksi antara negara berpendapatan menengah keatas (*upper-middle income*) dengan negara berpendapatan menengah kebawah (*lower-middle income*) (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2017).

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan perkembangan perekonomian suatu negara, yang dapat diukur dengan pendapatan nasional atau *Product Domestic Bruto* (PDB) ataupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi penting atau sesuatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan (Machmud, 2016, 34). Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan secara fisik terhadap produksi barang dan jasa yang berlaku disuatu negara. Keberhasilan kinerja pemerintah beserta lembaga dan instansi-instansi terkait cenderung diukur dari pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan. Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi menjadi penting dalam menilai keberhasilan suatu negara dalam mencapai pembangunan ekonominya. Rendahnya pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari faktor-faktor, seperti meningkatnya tingkat kemiskinan, rendahnya pendapatan, lemahnya sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Namun permasalahan timbul ketika sarana dan prasarana publik yang diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan produktivitas ekonomi memiliki kualitas yang buruk dan terbatas yang disebabkan oleh para pemangku kekuasaan yang melakukan penyelewengan terhadap anggaran, dimana hal tersebut memberikan dampak terhadap kekacauan di sektor publik dan pertumbuhan ekonomi.

Asia Tenggara merupakan salah satu wilayah di Asia yang memiliki organisasi Bernama *Assosiation of Southeast Asian Nations* (ASEAN) yang sampai sekarang masih berdiri dan memiliki tujuan agar sesama anggota ASEAN dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik. Asia Tenggara terdiri dari 11 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Kamboja, Laos, Vietnam, Myanmar dan Timor Leste. Pertumbuhan ekonomi kesebelas negara ini berbeda-beda seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini



Sumber: World Bank 2024, data diolah

Gambar 1.1 PDB (US\$) dan PDB perkapita (US\$) negara-negara Asean tahun 2022

Berdasarkan grafik 1.1 dapat dilihat bahwa Indonesia adalah negara dengan PDB terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2022 yaitu sebesar US\$ 1.371.171.152.331, kemudian disusul disusul oleh Thailand, singapura, Filipina, Vietnam, Malaysia, hingga Leste dengan pertumbuhan ekonomi terkecil sebesar US\$ 2.243.142.908. Namun, disamping pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDB total, jika dihitung dengan PDB per kapita, singapura adalah negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar US\$ 84.734,

kemudian disusul oleh Brunei Darussalam, Malayisa, Thailand, Indonesia, Vietnam hingga Myanmar dengan PDB perkapita terkecil sebesar US\$ 1.188. Fenomena ini dapat terjadi karena adanya perbedaan jumlah penduduk di negara-negara tersebut. PDB perkapita diukur dengan jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) dibagi dengan jumlah penduduk di negara tersebut sehingga dapat dilihat rata-rata pendapatan per kapita dari setiap negara. Berdasarkan kriteria bank dunia, 6 dari 11 negara yang ada di Kawasan Asia Tenggara, dikategorikan sebagai negara berpendapatan menengah kebawah (Lower-Middle Income). Keenam negara tersebut antara lain: Kamboja, Myanmar, Timor-Leste, Filipina, Vietnam dan Laos. Hal ini juga dapat dilihat melalui grafik 1.1 dimana keenam negara ini memiliki tingkat PDB perkapita terendah dibandingkan negara-negara lainnya. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, hingga ke peran institusi pemerintahan didalam membuat kebijakan ekonomi.

Pada dasarnya, pemerintahan dalam suatu negara memiliki peran fundamental dalam membawa perekonomian negaranya menuju kondisi yang ideal bagi rakyat. Hal itu juga dipikirkan oleh para ekonom neo klasik mengenai keterlibatan pemerintah dalam mengawasi dan mengoreksi ketidaksempurnaan pasar agar mampu mencapai kondisi sempurna. Ketika diperhadapkan dengan masalah eksternalitas, pemerintah dapat melarang aktivitas yang memicu eksternalitas itu sendiri. Pemerintah juga dapat mengenakan pajak untuk aktivitas yang dapat memicu eksternalitas negatif dan sebaliknya

Bagi pemilik kepentingan seperti pengusaha atau yang memiliki kekuatan untuk merepresentasikan kekuasaan agar mendapatkan keuntungan, terdapat hubungan yang erat antara pengusaha yang sedang mengejar keuntungan dengan pemerintah yang memangku kebijakan. Daripada mengutamakan kepentingan negara, muncul lah kepentingan pribadi atau kepentingan sekelompok orang dari dalam pemerintah sehingga pemerintah melakukan regulasi kebijakan yang akan menguntungkan bagi mereka. Pada negara berpendapatan menengah kebawah (*lower-middle income*), pemerintah memiliki peran yang sangat besar untuk mengejar ketertinggalannya dari negara-negara maju. Hal ini berlangsung sejak tahun 60-an melalui kritik Keynes, namun sampai saat ini kondisinya tidak berbeda dan terlihat sama saja. Negara-negara berkembang masih berupaya untuk mengejar ketertinggalannya dari negara maju terutama dari sisi pendapatan.

Namun dengan upaya yang telah dilakukan namun hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, muncul pertanyaan mengapa hasil yang diinginkan belum tercapai mengingat indikator-indikator makroekonomi yang kuat? Di tahun 60-an, perburuan rente telah menjadi salah satu faktor penyebab ketertinggalan negara-negara berkembang dari negara maju. Rente merujuk kepada sewa ekonomi, contohnya adalah keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan monopoli terus menerus dalam jangka panjang. Orang-orang yang memiliki kepentingan ini selalu mempertahankan kekuatan monopolinya dengan mencegah barang substitusi hingga akhirnya berada pada kondisi *supernormal* dan mendapat rente yang lebih tinggi. Pemilik kepentingan ini berkolusi dengan pemerintah agar pemerintah membuat kebijakan ekonomi yang menguntungkan mereka melalui kebijakan

publik seperti regulasi, perpajakan atau subsidi (Krueger, 1974) dengan janji pemilik kepentingan akan memberikan imbalan atau sogokan kepada pemerintah baik berupa uang atau hadiah. Imbalan yang diterima oleh pemerintah merupakan contoh dari rente karena kekuasaannya digunakan untuk kepentingan pribadi semata, yang apabila terus dilakukan akan menimbulkan kerugian dalam perekonomian negara karena kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan cenderung menghalangi efisiensi perekonomian. Harapan bahwa pemerintah akan memperbaiki kegagalan pasar, namun justru menimbulkan *government failure* yang campur tangannya justru merugikan negara. Hal-hal seperti ini cenderung terjadi di negara berpendapatan kecil-menengah dimana karakteristik masyarakatnya yang tidak demokratis, situasi politik yang cenderung tertutup dan akuntabilitas pemerintah yang tidak transparan.

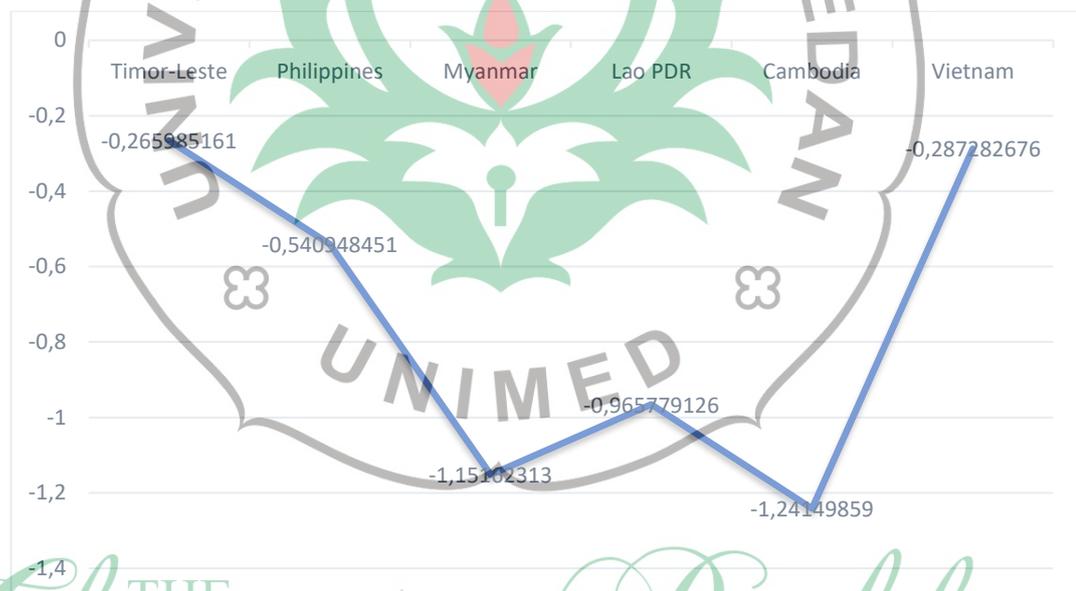
North (1990) dalam Iqbal dan Daly (2014) menguatkan argumen bahwa kerangka kelembagaan yang lemah akan memberikan ruang bagi perburuan rente terutama di negara berpendapatan menengah ke bawah (lower-middle income) yang masuk kedalam negara berkembang, dalam arti tidak berlaku adil dan memiliki keberpihakan terhadap golongan tertentu baik dalam hal perencanaan atau dalam praktik lapangan yang dapat menciptakan ruang yang lebih besar bagi perburuan rente. Akibat lemahnya kerangka kelembagaan tersebut memberikan ruang untuk melanggar aturan, penyalahgunaan sumber daya dan membatasi perdagangan sehingga memotivasi perburuan rente. Jika hal tersebut terjadi, perburuan rente akan mendistorsi kegiatan produktif ekonomi dan membebankan biaya sosial yang dapat merugikan seluruh masyarakat. Dengan adanya aktivitas

perburuan rente dalam perekonomian suatu negara merupakan pertanda buruknya kualitas kelembagaan (Ugur dan Dasgupta, 2011). Hal ini merupakan tantangan yang masih harus dihadapi oleh negara-negara berpendapatan menengah kebawah dan memerlukan pertimbangan kembali sebuah proses dimana seluruh komponen negara secara bersama merancang dan menetapkan kebijakan yang menjunjung tinggi kualitas kelembagaan dalam memerangi aktivitas perburuan rente (Auriol, 2016 dalam Wong, dkk., 2021)

Salah satu persepsi dalam mengukur kualitas kelembagaan atau institusi suatu negara adalah *Control of Corruption Index* yang menjadi salah satu indikator Dalam *World Governance Indicator* (WGI) oleh bank dunia. *Control of Corruption Index* mencerminkan persepsi tentang bagaimana kekuasaan politik digunakan untuk keuntungan pribadi seperti korupsi, baik dalam skala kecil maupun skala besar, serta perampasan oleh negara maupun pihak yang memiliki kepentingan pribadi. Index berkisar antara 2.5 hingga -2.5 dimana 2.5 menunjukkan pengendalian korupsi yang kuat (strongest) sementara -2.5 menunjukkan pengendalian korupsi yang lemah (*weakest*)

Asia Tenggara merupakan salah satu Kawasan di benua Asia yang memiliki 11 negara yang tergabung didalamnya sebelumnya terdapat 10 negara yang tergabung menjadi anggota ASEAN, namun pada tanggal 11 November 2022, Timor Leste resmi menjadi anggota Asean yang ke-11. Sebelas negara itu antara lain: Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Kamboja, Laos, Vietnam, Myanmar dan Timor Leste. Negara-negara dikawasan Asia Tenggara ini membentuk organisasi yang Bernama *Assosiation of South East Asian Nation*

(ASEAN) yang awalnya beranggotakan 5 negara yakni Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand. Kemudian hingga saat ini memiliki 11 anggota. Berdasarkan kriteria Bank Dunia, 6 dari 11 negara di Asia Tenggara dikategorikan sebagai negara berpendapatan menengah ke bawah (lower-middle income). Berdasarkan grafik 1.1 diatas, enam negara dengan tingkat PDB perkapita terendah di Asia Tenggara juga memiliki indeks persepsi korupsi yang rendah juga seperti yang ditunjukkan oleh gambar 1.2 berikut:



Sumber: Transparency international dan World Bank, 2024 (diolah)

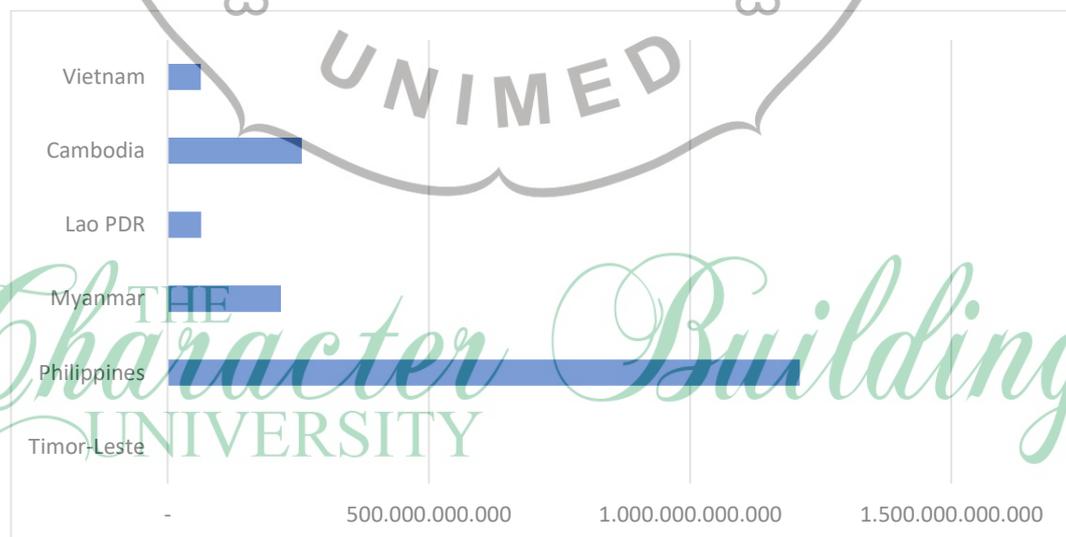
Gambar 1.2 Indeks Persepsi Korupsi enam negara berpendapatan kecil-menengah di Asia Tenggara tahun 2022

Berdasarkan grafik 1.2, Kamboja menjadi negara dengan tingkat pengendalian korupsi terlemah dibandingkan kelima negara berpendapatan menengah kebawah lainnya, dengan peringkat 162 dan skor 20 diikuti dengan angka pengendalian -1.24, kemudian Myanmar berada pada urutan kedua dengan peringkat 158 dan skor 22 diikuti angka pengendalian -1.15, Lao PDR berada di

peringkat 136 dengan skor 28 diikuti dengan angka pengendalian -0.96, Philippines berada pada peringkat 115 dengan skor 41 diikuti angka pengendalian -0.54, Vietnam berada pada peringkat 83 dengan skor 41 diikuti angka pengendalian -0.28 dan terakhir Timor-Leste dengan peringkat 70 dan skor 43 diikuti dengan angka pengendalian -0.26. jika dibandingkan dengan negara-negara pengendali korupsi terbaik di dunia, indeks perspsi korupsi yang dimiliki ke enam negara ini sangat rendah dan tertinggal jauh. Di tahun 2022, Denmark menjadi negara dengan tingkat pengendalian korupsi terkuat dengan angka 2.40, disusul Finland dengan angka 2.24. New Zealand menjadi peringkat ketiga dengan angka 2.16, Norway berada di peringkat keempat dengan angka 2.06, Singapore berada di peringkat kelima dengan angka 2.06, sementara Sweden berada pada peringkat keenam dengan angka 2.06.

Karena pada dasarnya korupsi (salah satu indikator perburuan rente) erat kaitannya terhadap kualitas lembaga atau institusi, peneliti menjadikan institusi atau lembaga pemerintahan sebagai fokus yang akan memiliki peran fundamental dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena memiliki peran yang besar, pejabat pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk menyebabkan sebagian besar perburuan rente (korupsi). Alasannya karena supremasi hukum di negara berpendapatan menengah kebawah cenderung lemah dan di negara-negara ini, individu, golongan atau kelompok terutama institusi banyak meninvestasikan waktu dan kekayaan untuk membuat atau mengubah peraturan yang akan mendukung aktivitas perburuan rente dan melindungi rente yang sudah didapatkan (Juhro dkk, 2020). Tullock (1967) menjelaskan bawa penggunaan sumber daya

yang tidak efisien atau menya-nyiakan sumber daya yang berharga dengan merusak nilainya dan tidak menjadi produktif adalah karakteristik dari perburuan rente. Ciri-ciri tersebut dapat menyebabkan hutang publik yang tinggi dan menghambat inovasi (Murphy dkk, 1993). Hasil temuan dari Daniel Kaufmann dkk (2011), menemukan dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi dan mencakup bagaimana korupsi dapat mempengaruhi pengelolaan utang dan efektivitas investasi. Temuan serupa dari Abdu-Raouf A. dan Hakim A. Nasr (2010), yang menemukan bagaimana korupsi dapat mempengaruhi kinerja ekonomi melalui mekanisme utang luar negeri dan kebijakan ekonomi. Berdasarkan data, berikut disajikan utang luar negeri dari keenam negara berpendapatan menengah kebawah di Asia Tenggara tahun 2023



Sumber: World Bank 2024, data diolah

Gambar 1.3 Grafik utang luar negeri negara-negara berpendapatan kecil-menengah di Asia Tenggara Tahun 2022

Berdasarkan grafik 1.3, Filipina memiliki utang luar negeri terbesar dengan total US\$ 1.209.833.983.280, kemudian diikuti oleh Kamboja dengan

total US\$ 256.814.043.292, Myanmar dengan total US\$ 216.877.789.096, Laos dengan total US\$ 63.927.000.543, Vietnam dengan total US\$ 63.739.238.974, dan terakhir Timor Leste dengan total US\$ 1.613.937.917

Terdapat beberapa pandangan penting tentang hubungan perburuan rente (diwakilkan dengan indeks persepsi korupsi) dan pertumbuhan ekonomi diantaranya yaitu: pertama, pengendalian perburuan rente memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana aktivitas perburuan rente menghasilkan fakta bahwa rente mengakibatkan pemborosan sumber daya dan cenderung menurunkan pertumbuhan ekonomi sehingga perlu diperkuatnya pengendalian perburuan rente agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkat (Fethi dan Imamoglu, 2021). Adanya *statement* perburuan rente memerlukan pengendalian yang baik juga diungkapkan oleh banyak peneliti karena perburuan rente disebut sebagai “*sand on the wheels*” yang memberatkan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Seperti temuan dari Ghalwash (2014) yang menemukan bahwa korupsi (yang menjadi indikator perburuan rente) memiliki efek negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Mesir. Temuan Ghalwash ini didukung oleh temuan Ibrahim dkk (2015) dimana hal serupa terjadi di Sub-Sahara Afrika. Korupsi memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara negatif melalui penurunan investasi karena kepercayaan investor yang berkurang (Wang, 2016). Selain itu hasil temuan Yun dkk (2015) juga menemukan bahwa korupsi dalam jangka panjang berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Malaysia. Demikian juga dengan temuan Amin dkk (2013); Ugur (2014); Thach dkk (2018); Boussalham (2018); Tidiane (2019); dan Grundler dan Potrafke (2019)

menemukan bahwa korupsi berpengaruh negatif dan signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan indikator pendapatan per kapita.

Sementara dalam situasi tertentu, korupsi (salah satu indikator perburuan rente) dilihat sebagai “*greasing of wheels*” yang melumasi roda pembangunan. Karena dengan adanya korupsi, dapat meningkatkan perekonomian yang pada akhirnya tidak memerlukan kontrol atau pengendalian lebih terhadap aktivitas korupsi atau dengan kata lain, pengendalian perburuan rente berpengaruh negatif dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Huang (2016) menemukan bahwa aktivitas korupsi (yang menjadi indikator perburuan rente) tidak menghambat Pembangunan ekonomi, namun sebaliknya korupsi mendorong peningkatan agregat ekonomi di negara Korea Selatan dan China. Hasil temuan Huang juga didukung oleh temuan Kato dan Sato (2015) dimana mereka menemukan dampak yang menguntungkan dari korupsi yang mengonfirmasi hipotesis “*greasing of wheels*”. Di sisi lain, Saha dan Sen (2019) menemukan pengaruh positif dan menyimpulkan bahwa korupsi dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan langsung didalam otokrasi daripada demokrasi.

Tidak sejalan dengan dua pandangan sebelumnya, dimana indeks persepsi korupsi (sebagai indikator perburuan rente) berpengaruh positif signifikan dan berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pandangan terakhir menyebutkan bahwa dampak perburuan rente terhadap pertumbuhan ekonomi tidak signifikan. Hasil penelitian dari Mikaelsson dan Sall (2014) meneliti hubungan korupsi (proxy perburuan rente) terhadap pertumbuhan ekonomi di negara

berkembang menemukan bahwa korupsi tidak memengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara berkembang.

Sampai saat ini, hasil studi empiris yang meneliti bagaimana hubungan perburuan rente terhadap pertumbuhan ekonomi masih menjadi perdebatan. Oleh karena itu, peneliti ingin turut berkontribusi pada topik ini dengan berfokus melihat pengaruh pengendalian perburuan rente dengan menggunakan indikator indeks persepsi korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi negara berpendapatan kecil menengah di Asia Tenggara. Peneliti akan menggunakan data jangka waktu 11 tahun antara tahun 2013 sampai tahun 2023. Kaitan antara pengendalian perburuan rente dengan pertumbuhan ekonomi penting untuk dikaji karena pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat proses pembangunan sebuah negara terutama negara berpendapatan kecil menengah di Asia Tenggara untuk mengejar ketertinggalannya dari negara satu kawasan atau mengejar ketertinggalannya dari negara maju.

Penelitian dengan judul **“Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara Berpendapatan Kecil-Menengah di Asia Tenggara Dengan Utang Luar Negeri Sebagai Variabel Intervening”** ini akan menyelidiki hubungan antara tingkat pengendalian korupsi dengan pertumbuhan ekonomi dengan mengikut sertakan pengaruh faktor, utang luar negeri kedalam kerangka pemodelan sebagai variabel intervening/moderasi. Berdasarkan Tullock (1967) menjelaskan bawa penggunaan sumber daya yang tidak efisien atau menyia-nyiakan sumber daya yang berharga dengan merusak nilainya dan tidak menjadi produktif adalah karakteristik dari perburuan rente. Ciri-ciri tersebut dapat

menyebabkan utang publik yang tinggi dan menghambat inovasi (Murphy dkk, 1993). Tanzi (1998) dan Rose-Arkerman (1999) juga mengatakan korupsi memiliki dampak negatif terhadap kinerja ekonomi dengan tidak hanya mengurangi investasi swasta dan memengaruhi pengeluaran pemerintah, namun juga mengakibatkan pengeluaran yang tidak seimbang dan alokasi sumber daya yang tidak tepat. Berdasarkan Todaro dan Smith (2012), dikatakan juga bahwa kelompok negara berdasarkan kriteria Pembangunan ekonomi yang berada dalam negara berkembang memiliki karakteristik hidup dan produktivitas yang rendah, tingkat modal manusia yang lebih rendah dari negara maju, tingkat ketimpangan, tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi, fraksionalisasi sosial yang lebih besar, sektor keuangan dan pasar lainnya yang kurang berkembang serta kualitas lembaga yang rendah dan memiliki ketergantungan eksternal. Harapannya, penelitian dengan judul “Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara Berpendapatan Kecil-Menengah di Asia Tenggara” yang saya teliti ini dapat memberikan gambaran dan kelompok negara yang menjadi topik penelitian ini dapat bergeser menjadi kelompok negara berpendapatan menengah keatas (middle-upper income) dan tidak memiliki karakteristik negara berkembang seperti yang sudah disebutkan diatas.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, ditemukan masalah-masalah penelitian untuk dicari jawabannya yaitu sebagai berikut:

1. Negara berpendapatan kecil-menengah (*lower-middle income*) di Asia Tenggara kesulitan untuk mencapai capaian Pembangunan ekonomi dari negara berpendapatan menengah ke atas. Hal tersebut dapat diamati melalui perbedaan tingkat PDB perkapita negara maju seperti Norway yang memiliki pendapatan perkapita tahun 2022 sebesar 106.177,20 US\$ terhadap negara Myanmar yang hanya memiliki pendapatan perkapita tahun 2023 sebesar 1.149,21 US\$.
2. Tingkat indeks persepsi korupsi di negara berpendapatan kecil-menengah Asia Tenggara masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang mencapai angka 2.4. Indeks persepsi korupsi kelompok negara di Asia Tenggara yang disebutkan masih berada dalam angka negatif.

1.3 Pembatasan Masalah

Didalam penelitian ini ada beberapa batasan masalah yang diberikan agar penelitian ini lebih terfokus atau terarah. Batasan tersebut antara lain:

1. Penelitian ini mengangkat lokasi atau wilayah Asia Tenggara dengan kategori pertumbuhan ekonomi negara berpendapatan kecil-menengah. Sesuai dengan kategori World Bank, secara global, terdapat 56 negara yang masuk kedalam kategori tersebut, namun peneliti hanya mengangkat penelitian ini untuk wilayah Asia Tenggara, dimana terdapat 6 negara yang masuk kedalam kategori ini yaitu: Timor Leste, Filipina, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam.
2. Penelitian ini menggunakan data dari tahun 2013-2022 yang merupakan data terbaru yang masih tersedia di World Development Indicators (WDI)

dan Transparency International (TI), tentunya data tersebut akan mengalami perkembangan terbaru yang bisa menjadi topik penelitian selanjutnya

3. Indikator yang digunakan untuk mengukur indeks persepsi korupsi pada penelitian ini adalah *estimate* yang datanya telah disediakan dan terpublikasi di *World Development Indicator*.
4. Terdapat variabel Intervening/mediasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu utang luar negeri. Variabel ini akan digunakan untuk melihat hubungan secara tidak langsung antara korupsi dengan pertumbuhan ekonomi melalui utang luar negeri. Alasan utang luar negeri dipilih menjadi variabel intervening adalah sesuai dengan teori dari Tullock (1967) yang menjelaskan bawa penggunaan sumber daya yang tidak efisien atau menyia-nyiakan sumber daya yang berharga dengan merusak nilainya dan tidak menjadi produktif adalah karakteristik dari perburuan rente. Ciri-ciri tersebut dapat menyebabkan utang publik yang tinggi dan menghambat inovasi

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis menuliskan rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh indeks persepsi korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi negara berpendapatan kecil-menengah di Asia Tenggara tahun 2013-2022?

2. Apakah terdapat pengaruh indeks persepsi korupsi terhadap utang luar negeri di negara berpendapatan kecil-menengah di Asia Tenggara tahun 2013-2022?
3. Apakah terdapat pengaruh utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berpendapatan kecil-menengah di Asia Tenggara tahun 2013-2022?
4. Apakah terdapat pengaruh utang luar negeri dalam memediasi indeks persepsi korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berpendapatan kecil-menengah di Asia Tenggara tahun 2013-2022?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditulis peneliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan pengaruh indeks persepsi korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi negara berpendapatan kecil-menengah di Asia Tenggara tahun 2013-2022
2. Menjelaskan pengaruh indeks persepsi korupsi terhadap utang luar negeri di negara berpendapatan kecil-menengah di Asia Tenggara tahun 2013-2022
3. Menjelaskan pengaruh utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berpendapatan kecil-menengah di Asia Tenggara tahun 2013-2022

Character Building
UNIVERSITY

4. Menjelaskan pengaruh utang luar negeri dalam memediasi indeks persepsi korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berpendapatan kecil-menengah di Asia Tenggara tahun 2013-2022

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah

penelitian ini akan berguna sebagai bahan rujukan, kajian, serta pertimbangan pemerintah dalam menentukan arah perekonomian terutama mengenai pengendalian korupsi

2. Bagi Penulis

Dapat memperoleh pengetahuan dan gambaran bagaimana pengaruh indeks persepsi korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi

3. Bagi pihak lain

Sebagai bahan studi lebih lanjut bagi kalangan akademis yang melakukan penelitian dengan topik yang sama.

THE
Character Building
UNIVERSITY